



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Pengaruh Islam dalam keputusan Arab Saudi memilih
program deradikalisasi sebagai instrumen kontra-
terorisme**

Skripsi

Oleh

Salsa Nayuni Wigati

2014330124

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Pengaruh Islam dalam keputusan Arab Saudi memilih
program deradikalisasi sebagai instrumen kontra-
terorisme**

Skripsi

Oleh

Salsa Nayuni Wigati

2014330124

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M. S

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

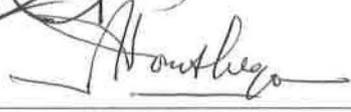
Nama : Salsa Nayuni Wigati
Nomor Pokok : 2014330124
Judul : Pengaruh Islam Dalam Keputusan Arab Saudi memilih
Deradikalisasi sebagai Instrumen Kontra-terorisme.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2018
Dan dinyatakan LULUS

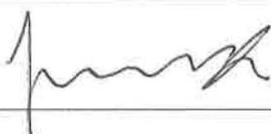
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. I Nyoman Sudira

: 

Sekretaris
Dr. Atom Ginting Munthe, M. S

: 

Anggota
Adrianus Harsawastika, S. IP, M. A

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Salsa Nayuni Wigati
NPM : 2014330124
Jurusan Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh islam dalam keputusan Arab Saudi
memilih program deradikalisasi sebagai instrumen
kontra-terorisme.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Januari 2018



Salsa Nayuni Wigati

Abstrak

Nama: Salsa Nayuni Wigati

NPM: 2014220124

Judul: Pengaruh Islam dalam keputusan Arab Saudi memilih program
deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme

Strategi kontra-terorisme Arab Saudi mengalami perubahan pada akhir tahun 2003 dari *hard power* menjadi *soft power* yang direalisasikan melalui penggunaan deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisinya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana Islam mempengaruhi keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisinya, dengan menggunakan teori konstruktivisme penulis akan menjelaskan pengaruh Islam yang membentuk identitas, budaya, dan norma di Arab Saudi dalam perubahan strategi kontra-terorisme Arab Saudi.

Riyadh Compound Bombings yang terjadi pada tahun 2003 menjadi peristiwa yang memicu perubahan pandangan Arab Saudi terhadap terorisme. Arab Saudi mulai melihat teroris sebagai ancaman serius bagi negaranya dan juga identitas negaranya, yaitu agama Islam. Arab Saudi memandang perang melawan teroris sebagai '*war of ideas*' dan memandang teroris sebagai korban dari radikalisme. Perubahan pandangan Arab Saudi terhadap teroris dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu interaksi antara Arab Saudi dan teroris, dan Islam sebagai identitas Arab Saudi. Keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi direalisasikan dalam program deradikalisasi Arab Saudi yaitu *Prevention, Rehabilitation, and After-Care Program*.

Kata kunci: Arab Saudi, deradikalisasi, kontra-terorisme, islam, terorisme, *war of ideas, prevention; rehabilitation; and after-care program*.

Abstract

Nama: Salsa Nayuni Wigati

NPM: 2014220124

Judul: *Islam's Influence in Saudi Arabia's decision in choosing deradicalisation as their counter-terrorism instrument.*

Saudi Arabia's counter-terrorism strategies were hard power approach, until at the end of 2003 Saudi Arabia changed their counter-terrorism strategies to soft power approach by using deradicalisation as their main instrument. The aim of this thesis is to analyse on how Islam influenced Saudi Arabia decision to choose deradicalisation as their counter-terrorism instrument. By using constructivism theory, I will explain the influence of Islam that shaped Saudi Arabia's identity, culture, and norms, in the alteration of Saudi Arabia counter-terrorism strategy.

Riyadh Compound Bombings in 2003 was a turning point for Saudi Arabia. Since then, Saudi Arabia started to see terrorist as a serious threat for their national security and national identity. Saudi Arabia perceives war against terrorist as a 'war of ideas' and Saudi Arabia sees terrorist as a victim of radicalism. Saudi Arabia's perception of terrorism is altered because of two factors, they are: the interaction between Saudi Arabia & terrorist, and Islam as Saudi Arabia identity. Arab Saudi decision in choosing deradicalisation as their counter-terrorism reflected in their deradicalisation program, namely Prevention, Rehabilitation, and After-Care Program.

Keyword: *Saudi Arabia, deradicalisation, counter-terrorism, islam, terrorism, war of ideas, prevention; rehabilitation; and after-care program.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang berkat karunia dan rahmatnya telah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Arab Saudi dalam keputusan Arab Saudi Memilih Deradikalisasi Sebagai Instrumen Kontra-terorism”. Adapun penulisan skripsi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, pertama penulis sangat berterimakasih kepada Dr. Atom Ginting Munthe selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan kritik serta saran yang banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Papa, Mami, Daddy, Philip, dan keluarga saya atas doa dan dukungannya selama ini. Dan juga semua teman dan sahabat saya atas doa, dukungan, dan masukannya selama ini. Penulis sangat terbuka pada kritik dan saran untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan penelitian yang akan datang.

Bandung, 15 Januari 2018

Salsa Nayuni Wigati

DAFTAR ISI

Pernyataan	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
 BAB 1 – Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Kegunaan Penelitian	
1.6.1 Kegunaan Praktis	11
1.6.2 Kegunaan Teoritis	11
1.7 Pertanyaan Penelitian	11
1.8 <i>Literature Review</i>	12
1.9 Kerangka Pemikiran	19
1.10 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	27
1.11 Sistematika Pembahasan	28
 BAB 2 – Islam & Perspektif Arab Saudi Terhadap Terorisme	
2.1 Identitas dan Budaya Arab Saudi	32
2.1.1 Islam dan Wahhabisme	34
2.1.2 Budaya dan Norma	39

2.2 Arab Saudi dan Terorisme	
2.2.1 Fase Sebelum Tahun 2003 (1990 – Awal Tahun 2003)	43
2.2.2 Pasca <i>Riyadh Compound Bombings</i> (Pertengahan Tahun 2003-2004)	46
BAB 3 – Deradikalisasi	
3.1 Radikalisasi	51
3.2 Deradikalisasi dan <i>Disengagement</i>	54
3.3 Deradikalisasi di Arab Saudi	59
BAB 4 – Analisa	
4.1 Prevention, Rehabilitation, and After-care Approach	
4.1.1 Program Pencegahan	67
4.1.2 Rehabilitasi	69
4.1.3 After-Care	72
4.1.4 Al – Sakina: Deradikalisasi Berbasis Internet	75
4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perspektif Arab Saudi Terhadap Teroris	
4.2.1 Islam Sebagai Identitas	79
4.2.2 Interaksi Arab Saudi dan Teroris	82
4.3 Islam dalam Pemilihan Deradikalisasi Sebagai Instrumen Kontra-terorisme	85
BAB 5 – Kesimpulan	91
Daftar Pustaka	93

Daftar Tabel

Tabel 1.1	17
Tabel 3.1	61

Daftar Gambar

Gambar 1.1	24
------------------	----

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme, merupakan kejahatan lintas batas negara yang dari tahun ke tahun selalu memakan banyak korban jiwa, bukan hanya aparat pemerintah negara yang jadi sasaran, namun masyarakat sipil pun menjadi sasaran. Terorisme adalah kejahatan lintas batas, karena dalam proses perencanaan dan eksekusi rencana serangan yang dilakukan oleh kelompok terorisme seringkali tidak terjadi di satu negara. Contohnya, sebuah kelompok teroris melakukan perencanaan operasi di negara A, pembiayaan operasi dilakukan atau berasal dari negara B, dan eksekusi dari operasi tersebut dilakukan di negara C, hal tersebut dilakukan untuk memperluas wilayah yurisdiksi dan meminimalisir efektivitas dari proses penegakan hukum¹. Aksi terorisme berbeda dengan kejahatan atau tindak kekerasan lainnya, terorisme sering dikaitkan dengan tindak kekerasan yang di motivasi oleh kepentingan politik atau ideologi, namun hingga saat ini belum ada definisi pasti atau umum mengenai terorisme. PBB mendefinisikan terorisme sebagai tindakan (apapun termasuk yang tercantum dalam *Geneva Conventions and Security Council resolution 1566 (2004)*), yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau luka serius terhadap warga sipil atau non-kombatan, yang secara garis besar tindakan tersebut menurut sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi penduduk, atau untuk memaksa Pemerintah atau organisasi internasional untuk

¹ Louise I Shelley, "Border Issues: transnational crime and terrorism." *Borders and Security Governance Managing Borders in a Globalised World* (2006). Hal 9.

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan². Jika kita berkaca pada aksi–aksi terorisme yang terjadi pasca kejadian 11 September 2001 maupun aksi terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, rata–rata kelompok terorisme muncul mengatasnamakan agama, ideologi, dan memiliki tujuan politik.

Aksi terorisme sudah banyak terjadi jauh sebelum peristiwa 9/11, namun peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat tersebut menjadi titik dimana terorisme dianggap sebagai masalah global yang menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. Dan peristiwa tersebut juga menjadi awal dimana Islam diidentikan dengan terorisme, karena berdasarkan faktanya, dalang dibalik peristiwa 9/11 merupakan kelompok teroris yang mengatas namakan islam dalam aksinya, yaitu Al Qaeda. Namun pemikiran semua orang muslim adalah teroris bukanlah asumsi yang benar. Aksi terorisme ini bukan muncul hanya karena latar belakang agama atau ideologi tertentu saja, memang teroris terbentuk karena pemikiran radikal atau ekstrim mengenai agama atau ideologi tertentu, namun aksi–aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris biasanya juga di latar belakangin oleh kepentingan atau tujuan politik tertentu.

Pasca peristiwa 9/11, terorisme berevolusi, seiring berjalannya waktu, serangan–serangan yang dilakukan dan komposisi anggota kelompok teroris berubah. Serangan–serangan yang dilakukan tidak lagi berskala besar dan rumit seperti serangan 9/11, serangan yang dilakukan cenderung berskala kecil dan menggunakan persenjataan yang dirakit sendiri, seperti contohnya serangan di Paris

² "Part 2 *Collective security and the challenge of prevention - VI. Terrorism.*" In *A more secure world: our shared responsibility: report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change*, 52. Proceedings. New York: United Nations, 2004. Diakses pada 8 Februari 2017. https://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf.

ataupun Brussels³, dimana serangan bom bunuh diri digunakan sebagai instrumen dalam melakukan aksi terorisme di peristiwa tersebut. Selain itu, komposisi anggota tidak lagi murni warga negara dari negara asal kelompok teroris, namun kini kelompok teroris berbentuk jaringan dan beragam kewarganegaraanya⁴. Teroris bukan hanya warga negara dari negara asal kelompok teroris (yang kebanyakan adalah berasal dari Timur Tengah), masyarakat Eropa, Asia, maupun Amerika pun kini bisa menjadi bagian dari jaringan terorisme. Hal tersebut membuat serangan – serangan menjadi lebih mudah untuk dilakukan (kini aksi terorisme dilakukan bukan hanya dengan pengeboman tapi bias juga pembunuhan, penembakan, pembajakan, maupun penculikan⁵) serta membuat serangan menjadi sulit di deteksi karena kini ancaman cenderung datang dari dalam (yang melakukan aksi terorisme seringkali warga negara/tinggal di negara yang menjadi target) dan tempat – tempat yang menjadi target adalah tempat – tempat umum seperti café, restaurant, hotel, mall, ataupun bandar udara.

Bukan hanya teroris yang berevolusi, cara pandang negara mengenai terorisme pun berubah. Pada saat terjadi peristiwa 9/11, Amerika Serikat memandang terorisme sebagai '*a war against the west*', maka dari itu Presiden Amerika Serikat, George W. B, mendeklarasikan *Global War on Terror*⁶, dan instrumen yang digunakan dalam kontra-terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat pun

³ James Miller. "*The Evolution of Terrorism Since 9/11.*" RadioFreeEurope/RadioLiberty. June 06, 2016. Diakses pada 11 Februari 2017. <http://www.rferl.org/a/evolution-of-terrorism-since-911/27782825.html>.

⁴ Ann E Robertson, *Terrorism and global security*. New York NY: Facts On File, 2007. Hal. vii.

⁵ Loc.cit.

⁶ Laurence Andrew Dobrot. *The global war on terrorism: a religious war?* Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College, 2007. Hal. 1.

identik dengan militer. Namun, sejak tahun 2004 terorisme bermetamorfosis menjadi *'crime'* atau kejahatan⁷. Cara pandang negara berubah, begitu juga cara negara menangani aksi terorisme. Pasca 9/11 semakin banyak metode – metode yang digunakan dalam kontra-terorisme. Kontra-terorisme di definisikan sebagai ‘kegiatan dan operasi yang dilakukan untuk menetralsir teroris, organisasi dan jaringan teroris untuk mencegah mereka melakukan kekerasan yang bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka’⁸. Definisi dari kontra-terorisme sebenarnya beragam dan terus berubah seiring dengan berevolusinya terorisme, namun pada intinya kontra-terorisme merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh aktor tertentu (biasanya negara) untuk melawan aksi terorisme.

Serangkaian perjanjian maupun kerjasama dalam bidang kontra-terorisme sudah banyak dibuat, baik oleh PBB, organisasi regional, maupun perjanjian atau kebijakan yang dibuat secara bilateral. Dalam pengimplementasian kebijakan atau perjanjian tersebut, kebanyakan menggunakan *hard power approach*. Sayangnya, metode tersebut belum bisa menghancurkan terorisme hingga ke akarnya dan tidak bisa membendung perkembangan kelompok teroris yang sekarang semakin besar dan luas jaringannya. Dengan terus berkembangnya jaringan terorisme di dunia, negara-negara di dunia pun terus berusaha mencari metode atau pendekatan yang

⁷ Janani Krishnaswamy. "How Does Terrorism Lend Itself to Constructivist Understanding?" E-International Relations. 18 September 2012. Diakses pada 11 Februari 2017. <http://www.e-ir.info/2012/09/18/how-does-terrorism-lend-itself-to-constructivist-understanding/>.

⁸ United States of America. DOD dictionary of military and associated terms. Washington, DC: Joint Chiefs of Staff, 1994. Diakses pada 11 Februari 2017. http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/dictionary.pdf.

tepat untuk membendung perkembangan dan memberantas kelompok teroris yang berkembang dengan pesat.

Metode yang diterapkan oleh negara kebanyakan adalah *hard power approach*, namun karena pendekatan tersebut belum bisa membendung perkembangan kelompok terorisme, kini negara – negara mulai mencoba menerapkan program deradikalisasi sebagai alat kontra-terorismenya. Salah satu negara yang menerapkan program deradikalisasi adalah Arab Saudi. Deradikalisasi sendiri di definisikan sebagai metode atau teknik yang digunakan untuk merusak dan memutarbalikan pengaruh dari radikalisasi terhadap seseorang, yang bisa mengurangi potensi seseorang untuk melakukan tindakan terorisme⁹. Program deradikalisasi dilakukan menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan dalam proses radikalisasi, yaitu dengan melakukan mengenai agama, ideologi, dan kehidupan sosial dari teroris tersebut. Yang membedakan deradikalisasi dengan radikalisasi adalah pada saat proses radikalisasi, individu yang terlibat di isolasi dari dunia luar dan hanya diajarkan apa yang dianggap kelompok teroris tersebut benar¹⁰, sedangkan dalam proses deradikalisasi teroris tersebut diberikan pemahaman agama yang benar dan yang sesuai dengan ajaran di negara tersebut, selain itu (mantan) teroris tersebut juga dibantu untuk menjalankan kehidupan sosial yang normal lagi.

⁹ Lindsay Clutterbuck. Understanding Deradicalization: Pathways to Enhance Transatlantic Common Perceptions and Practices. The Middle East Institute. Middle East Institute. 10 Juni 2015. Diakses pada 3 Agustus 2017. <http://www.mei.edu/sites/default/files/Clutterbuck.pdf>.

¹⁰ "Background: Definitions and the Radicalization Process." In *A New Approach? Deradicalization Programs and Counterterrorism*. Proceedings of Countering Violent Extremism: Learning from Deradicalization Programs in Some Muslim-Majority States, Jordan, Amman. June 2010.

Salah satu negara yang kini menerapkan deradikalisasi adalah Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang menjadi sumber kelompok teroris namun secara bersamaan Arab Saudi juga menjadi target tindak terorisme. Setelah serangkaian serangan terorisme yang dialami oleh Arab Saudi pada 2003 hingga 2004, Arab Saudi merasa bahwa metode kontra-terorisme yang pada masa itu digunakan tidak bisa melawan terorisme sepenuhnya. Mulai tahun 2004 Arab Saudi mulai menerapkan program deradikalisasi, dan Arab Saudi dianggap sebagai negara yang paling cocok untuk menerapkan program ini, karena latar belakang Arab Saudi yang merupakan negara Islam dan memiliki ‘tempat’ special dalam agama Islam¹¹, Arab Saudi merupakan tempat lahirnya agama Islam dan mayoritas masyarakat Arab Saudi adalah penganut agama Islam. Arab Saudi membangun legitimasi negaranya menggunakan ideologi islam, yaitu dengan menggunakan paham Wahhabi sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahannya. Wahhabisme merupakan sebuah paham yang pertama kali di cetuskan oleh Muhammad bin Abd Al Wahhab, paham ini mendorong umat muslim untuk menghindari praktek-praktek agama yang terkesan seperti ‘menyembah berhala’ seperti merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada intinya paham ini menyarankan umat muslim untuk melakukan praktek agama yang murni dan ortodoks, dan sepenuhnya mengacu pada Al – Qur’an¹².

¹¹ Andreas Casptack. “*Deradicalization Programs in Saudi Arabia: A Case Study.*” The Middle East Institute. Middle East Institute. Hal. 2.

¹² U.S. Congress. *The Islamic traditions of Wahhabism and Salafiyya.* By Christopher M Blanchard. Cong. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2008. Diakses pada 28 September 2017. <https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf>.

Perkembangan - perkembangan dari terorisme seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah ini menjadi salah satu dasar atau penyebab munculnya program deradikalisasi, melalui pendekatan ini negara berusaha membendung perkembangan terorisme dengan menggunakan instrumen yang seringkali juga menjadi faktor pendorong berkembangnya kelompok teroris, yaitu agama. Arab Saudi sebagai negara Islam dianggap cocok untuk menerapkan program deradikalisasi ini karena mereka memiliki latar belakang agama yang sama dengan kelompok terorisme kebanyakan, keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisinya pun tidak lepas dari identitas yang dimiliki Arab Saudi. Topik ini bagi penulis sangat menarik, dalam penelitian ini penulis akan meneliti pengaruh islam dalam keputusan Arab Saudi memilih instrument kontra-terorisinya. Penulis memilih Arab Saudi karena program yang dilakukan Arab Saudi merupakan salah satu yang terbaik dan sering dijadikan referensi oleh negara lain dalam melakukan program deradikalisasinya. Penelitian ini akan diberi judul *Pengaruh Islam dalam keputusan Arab Saudi memilih program deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme.*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah dan fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, muncul pokok – pokok permasalahan dari fenomena tersebut, yaitu yang **pertama**, pasca peristiwa 9/11 aksi terorisme semakin marak terjadi dunia dan memakan banyak korban jiwa, kelompok terorisme pun berkembang dari yang tadinya hanya beranggotakan teroris yang berasal dari negara kelompok terorisme tersebut menjadi jaringan (anggotanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda).

Serangan yang dilakukan pun cenderung lebih berskala kecil tidak seperti aksi terorisme yang terjadi pada 11 September 2001, target aksi terorisme kini adalah tempat – tempat umum seperti *café*, restoran, *mall*, hotel, ataupun bandar udara seperti contohnya pada kasus *Riyadh Coumpound Bombings* dimana kelompok teroris Al – Qaeda melakukan serangannya di area pemukiman¹³. Yang **kedua**, kelompok teroris yang muncul belakangan ini mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu dan memiliki kepentingan atau tujuan politik tertentu, bisa disimpulkan bahwa teroris muncul dari pemahaman radikal akan suatu ideologi atau (belakangan ini lebih cenderung) agama.

Perubahan – perubahan yang terjadi memunculkan permasalahan yang **ketiga**, yaitu berubahnya pandangan atau perspektif negara tentang apa itu terorisme dan bagaimana terorisme seharusnya diatasi, aksi terorisme berubah dari *'war against states'* menjadi *'crime'* atau ada juga negara yang mengintepretasikan terorisme sebagai *'war of ideas'*, dan negara – negara di dunia kini masih mencari – cari metode apa yang tepat untuk mengatasi kejahatan lintas batas ini, karena walaupun sudah ada kebijakan maupun perjanjian dalam bidang kontra-terorisme namun usaha – usaha tersebut belum ada yang bisa menghancurkan terorisme hingga ke akarnya. Yang **keempat**, setiap negara memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai terorisme, tidak ada *one-size fits all approach* jika kita membahas mengenai terorisme atau metode yang tepat dalam melakukan kontra-terorisme. Setiap negara memiliki identitas, budaya, norma, dan sejarah yang berbeda-beda,

¹³ "At Least 10 Americans Killed in Saudi Terror Attack." Fox News. 13 Mei 2003. Diakses pada 24 Maret 2017. <http://www.foxnews.com/story/2003/05/13/at-least-10-americans-killed-in-saudi-terror-attack.html>.

bagaimana negara memandang terorisme juga berbeda-beda tergantung bagaimana negara tersebut mengkonstruksikan terorisme. Maka dari itu, metode kontra-terorisme yang dipilih oleh negara tersebut juga akan berbeda dengan negara lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada usaha kontra-terorisme menggunakan *soft power approach* yaitu program deradikalisasi. Penulis akan fokus pada satu negara, yaitu Arab Saudi. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa bagaimana islam dapat memberikan pengaruh dalam keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi sebagai metode kontra-terorisme di negaranya. Negara yang akan digunakan dalam analisa penelitian ini adalah Arab Saudi yang sudah menerapkan program deradikalisasi sejak akhir tahun tahun 2003. Perlu diketahui, aspek yang akan dianalisa oleh penulis adalah identitas, aspek historis, budaya, norma – norma yang berlaku di Arab Saudi, dan interaksi antara kedua aktor (yaitu pemerintah Arab Saudi dan kelompok teroris). Selain itu, penelitian ini akan dibatasi pada tahun 2003 hingga tahun 2004.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok – pokok permasalahan yang telah di deskripsikan dalam identifikasi masalah diatas, berikut ini akan dirumuskan permasalahan yang akan dianalisis, dan dijawab dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Islam mempengaruhi keputusan Arab Saudi menggunakan deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme?

1.5 Tujuan Penelitian

Di dalam tulisan ini, peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada Islam dalam keputusan Arab Saudi menggunakan deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorismenya. Pada dasarnya, identitas, aspek historis, budaya, norma – norma yang berlaku di negara tersebut, dan interaksi antara kedua aktor (dalam penelitian ini yang dijadikan fokus adalah interaksi antara Arab Saudi dan kelompok teroris) bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang ada di suatu negara, salah satunya dalam membuat kebijakan kontra-terorisme. Penelitian ini akan meneliti salah satu metode kontra-terorisme yaitu program deradikalisasi, deradikalisasi merupakan “*soft power approach*” yang merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk merusak dan memutarbalikan pengaruh dari radikalisme terhadap seseorang, yang bisa mengurangi potensi seseorang untuk melakukan tindakan terorisme¹⁴. Deradikalisasi biasanya dilakukan kepada pelaku aksi terorisme yang sudah ditangkap dengan melibatkan tokoh agama; psikologis; serta akademisi untuk berdialog dengan mantan anggota kelompok teroris tersebut.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplanasikan bagaimana Islam mempengaruhi keputusan Arab Saudi memilih program deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme, apa yang menyebabkan perspektif Arab Saudi berubah, dan bagaimana Arab Saudi menerapkan deradikalisasi tersebut di negaranya.

¹⁴ Lindsay Clutterbuck. Understanding Deradicalization: Pathways to Enhance Transatlantic Common Perceptions and Practices. The Middle East Institute. Middle East Institute. 10 Juni 2015. Diakses pada 3 Agustus 2017. <http://www.mei.edu/sites/default/files/Clutterbuck.pdf>.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1. Praktis

Secara praktis penelitian ini bagi penulis, diharapkan bisa menambah wawasan penulis bahwa masalah identitas juga dapat memberikan dampak pada keputusan suatu negara mengenai kebijakan – kebijakan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara, dalam kasus ini adalah konstruksi identitas dalam kebijakan kontra-terorisme. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini bisa membuka pandangan dan menambah wawasan bahwa identitas negara juga merupakan salah satu faktor penting yang bisa mendorong keputusan suatu negara, terutama dalam bidang keamanan atau pertahanan.

1.6.2. Teoritis

Secara teoritis diharapkan masalah ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dalam penerapan konsep konstruktivisme dalam kajian keamanan yaitu *'security is socially constructed'* dan menjadi bukti bahwa dalam usaha negara untuk mencapai *'security'*, identitas dari negara yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor penentu.

1.7 Pertanyaan Penelitian

Dari pertanyaan – pertanyaan dan fokus penelitian diatas, peneliti merumuskan bahwa karakteristik Arab Saudi adalah aspek yang paling mempengaruhi dalam keputusan Arab Saudi menggunakan deradikalisasi sebagai instrument kontra-terorisme di negaranya. Sehingga muncullah pertanyaan

penelitian, yaitu, **bagaimana islam dapat mempengaruhi keputusan Arab Saudi memilih program deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme?**

1.8 Kajian Literatur

Deradicalization Programs in Saudi Arabia: A Case Study oleh Andreas Casptack

Pasca peristiwa 11 September 2001, Arab Saudi semakin gencar melakukan operasi kontra-terorisme di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi melakukan serangkaian penangkapan, penginterogasian, serta memberikan hukuman mati kepada beberapa ketua Al – Qaeda. Namun, pada Mei 2003, anggota Al-Qaeda menyerang tiga kompleks perumahan di Riyadh, menewaskan 27 orang. Akibatnya, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk merubah upaya kontra-terorisinya menggunakan dengan pendekatan baru yang lebih "lembut", yaitu deradikalisasi. Tahap pertama dari deradikalisasi adalah program yang berlangsung di dalam penjara, terdiri dari konseling (al-Munasahah) oleh ulama Islam dan memberikan pendidikan mengenai agama. Program deradikalisasi ini dimulai pada tahun 2004 oleh Asisten Menteri Dalam Negeri, Pangeran Muhammad bin Nayef, dan dijalankan oleh Komite Penasehat, yang berbasis di Riyadh dan memiliki tujuh kantor regional. Di awal program deradikalisasi, narapidana memulainya dengan menjelaskan ideologi dan apa yang menjadi motivasi mereka kepada ulama Islam dan setelah itu memulai kursus akademis mengenai agama yang bertujuan untuk merubah pemikiran para teroris ini bahwa interpretasi mereka mengenai jihad yang tertera di dalam al-Qur'an tidak benar.

Arab Saudi dianggap sebagai negara yang paling cocok untuk menerapkan program ini, karena latar belakang Arab Saudi yang merupakan negara Islam dan memiliki ‘tempat’ special dalam agama Islam. Program deradikalisasi yang diterapkan oleh Arab Saudi merupakan perpaduan dari *soft power approach* dan *hard power approach*, karena memadukan antara pendidikan agama islam dan psikologis, dan teroris yang menjalankan program ini tetap di penjara dan harus menjalankan hukumannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Perbedaannya, selama masa tahanannya, tahanan mendapatkan pendidikan – pendidikan agama, diberi terapi serta menjalankan rehabilitasi, selain untuk menderadikalisasi pola pikir dari tahanan tersebut, program ini juga bertujuan untuk mengembalikan diri tahanan ke dirinya yang normal dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga setelah ia keluar dari penjara ia bisa menjalankan kehidupannya seperti biasa lagi. Program ini melibatkan juga keluarga dari tahanan untuk membantu memulihkan kepercayaan diri dan melatih diri tahanan untuk berinteraksi lagi dengan orang lain.

Tulisan yang berjudul “*Deradicalization Programs in Saudi Arabia: A Case Study*” relevan untuk mendukung penelitian penulis, jurnal ini dapat membantu penulis dan memberikan data bagi peneliti dalam menjelaskan bagaimana program deradikalisasi yang diterapkan oleh Arab Saudi. Selain itu, jurnal ini juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi penulis untuk mengeksplanasikan karakteristik yang dimiliki oleh Arab Saudi. Penulis tidak akan terpaku pada tulisan ini saja, namun penulis juga akan mencari sumber – sumber lain yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen penulis dalam penelitian ini.

Constructivism by Matt McDonald – a chapter in *Security Studies: An Introduction* (oleh Paul Williams)

Konstruktivisme menjadi pendekatan teoritis yang cukup menonjol sejak kemunculannya pada tahun 1980. Teori ini merupakan kombinasi dari pendekatan sosiologis dan *critical theory*, konstruktivis berpendapat bahwa dunia itu terkonstruksi secara sosial melalui hasil interaksi intersubjektif; dimana agen dan strukturnya saling berhubungan dan memberikan dampak pada satu sama lain; dan faktor – faktor seperti norma, identitas, dan ide secara umum merupakan hal – hal pokok dalam konstitusi dan dinamika politik dunia. Konstruktivisme pertama kali di elaborasikan dalam buku Nicholas Onuf yaitu '*World of Our Making*' pada tahun 1989, teori ini secara luas telah digunakan sebagai pendekatan ke isu politik hingga ekonomi, konstruktivisme juga digunakan dalam kajian keamanan, namun pengaplikasiannya berbeda dengan *critical theory* lainnya dimana konstruktivis lebih fokus pada norma dan identitas.

Friedrich Kratochwill (1993) dan Alexander Wendt (1992) berpendapat, pendekatan konstruktivis sepakat bahwa dengan perubahan - perubahan struktural diaktifkan oleh aktor strategis dalam politik dunia; terutama setelah perang dingin berakhir. Asumsi utama dari pendekatan konstruktivis dalam kajian keamanan adalah 'keamanan adalah konstruksi sosial'. Keamanan terbentuk dari interaksi antar aktor, dan di negosiasikan melalui konteks sosial dan historis tertentu melalui interaksi sosial yang akhirnya membuat 'keamanan' menjadi nyata. Konstruktivis dalam analisa, menekankan pentingnya identitas (termasuk budaya, dan sejarah), norma serta nilai – nilai yang berlaku di suatu negara yang mendorong terbentuknya

arti atau definisi tertentu bagi aktor yang berbeda dan apa tujuan mereka. Konsepsi ‘*who we are*’ dan ‘*what we value*’ mendorong terbentuknya pemikiran – pemikiran tertentu mengenai dimana ancaman terhadap nilai – nilai yang dianut itu berasal, bentuk ancaman tersebut seperti apa, dan apa langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

Konstruktivis menegaskan bahwa *security* merupakan arena negosiasi (antar pemimpin politik dan audiens domestik tertentu) dan pembantahan (antara aktor yang berbeda mengelaborasi pandangan mengenai ‘*our values*’ and ‘*how we should act*’). Konstruktivis menekankan pada pentingnya support dari publik atau masyarakat pada pandangan elit politik dan peran aktor non – negara menjadi penting dalam ‘mengarahkan’ atau memberi sugesti terhadap pemerintah mengenai kebijakan apa yang harus diambil, norma apa yang harus diterapkan.

Constructivism by Matt McDonald yang merupakan bagian dari jurnal *Security Studies: An Introduction* digunakan oleh penulis sebagai salah satu acuan dalam mengeksplanasikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konstruktivisme. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan mengenai *conventional constructivism* dan *critical constructivism*, dalam penelitian ini penulis menggunakan pemikiran *conventional constructivism* sebagai landasan untuk menganalisa hubungan antara identitas dan keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi.

Deradicalization Programs and Counterterrorism: A Perspective on the Challenges and Benefits oleh Lindsay Clutterbuck PhD

Kata “radikalisasi” bisa digunakan untuk mendeskripsikan situasi atau proses dimana cara berpikir individu (atau kelompok) berkembang dalam keadaan atau kesempatan yang tepat, dimana hal tersebut meningkatkan kemungkinan individu atau kelompok tersebut untuk melakukan tindakan ekstrimis atau terorisme. Maka dari itu, kata “deradikalisasi” bisa di deskripsikan sebagai metode atau teknik yang digunakan untuk merusak dan memutarbalikan pengaruh dari radikalisasi terhadap seseorang, yang bisa mengurangi potensi seseorang untuk melakukan tindakan terorisme.

Namun, kebingungan dapat timbul karena istilah deradikalisasi sering dikaitkan sebagai metode yang luas, mencakup metode dan teknik lain yang berbeda namun sama-sama bertujuan mengurangi risiko berkembangnya terorisme, termasuk kontra-radikalisasi (istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode untuk menghentikan atau mengendalikan radikalisasi saat terjadi) dan anti-radikalisasi (istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode untuk mencegah radikalisasi terjadi). Sebelum kita mempertimbangkan kata "deradikalisasi" dan kesulitan untuk menerapkannya dalam keadaan tertentu, penting untuk memahami arti detail dari "radikalisasi," "violent extremism," dan "terorisme". Pasca peristiwa 9/11, radikalisasi digambarkan sebagai eskalasi dari sikap dan perilaku yang terus berkembang, yang membuat individu-individu yang merasa tidak puas (terutama Muslim) dengan kondisi sosialnya melakukan tindakan dan perilaku yang dinamakan "terorisme".

Cara umum untuk mendefinisikan deradikalisasi adalah dengan menghadirkan paradoks logis, karena awalan "de" dalam "deradicalization" menyiratkan bahwa

deradikalisasi adalah sebuah metode atau proses yang hanya dapat diterapkan pada individu atau kelompok yang sudah mengalami radikalisasi. Banyak usaha dan sumber daya telah dikerahkan oleh berbagai negara dalam program kontra-terorisme-nya, baik untuk menghentikan atau mengurangi pertumbuhan radikalisasi karena secara aktif terjadi dan untuk mencegahnya berkembang. Untuk menggambarkan semua program ini bersama di bawah kata “deradikalisasi” adalah keliru, dan ini bisa membuat penanganan masalah menjadi lebih rumit. Maka dari itu, kita perlu memahami lebih jauh mengenai arti dari deradikalisasi dan pada situasi apa deradikalisasi ini dapat digunakan

Tabel 1.1: Derivasi jenis program yang dibutuhkan dalam mengatasi insurgensi, terorisme, kekerasan ekstrimis.

Type of Behaviour Targeted	Dominant societal conditions under which behavior is exhibited	Desired end state	Type of program required
Insurgency Terrorism	High intensity conflict Low intensity conflict	Cessation of violence	Deradicalization
Transition to terrorism Violent extremism Extremism	Non-violent ‘normality’ predominates	Prevention of violence or further violence	Counter-radicalization
Vulnerability risk of radicalization and violent extremism	Non-violent ‘normality’ predominates	Prevention of violence	Anti-radicalization

		Minimizing risk from further radicalization	
--	--	---------------------------------------------------	--

Tabel 1.1 – Sumber: “*Understanding Deradicalization: Pathways to Enhance Transatlantic Common Perceptions and Practices*” yang ditulis oleh Lindsay Clutterbuck.¹⁵

Tabel tersebut menunjukkan bahwa daripada menggambarkan deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan anti-radikalisasi sebagai aspek dari deradikalisasi dan menunjukkan pentingnya program deradikalisasi, akan lebih informatif untuk memahami perbedaan diantara tiga jenis program utama yang mungkin, hanya satu yang harus dianggap sebagai program deradikalisasi. Jenis program kedua adalah kontra-radikalisasi, program di mana digunakan untuk menghentikan, memperlambat, atau mengurangi radikalisasi saat radikalisasi terjadi secara aktif. Tipe ketiga adalah anti radikalisasi, digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil untuk mencegah dan mencegah radikalisasi agar tidak muncul dan berakar pada awalnya. Sedangkan, kata “deradikalisasi” dapat diaplikasikan pada konteks dimana individu atau kelompok yang dijadikan subjek, bukan hanya sudah memiliki pemikiran yang radikal, namun juga sudah melakukan tindak kekerasan yang identik dengan aksi terorisme.

Jurnal mengenai deradikalisasi ini relevan bagi penelitian penulis. Jurnal ini akan penulis gunakan untuk menjadi salah satu acuan dalam mendeskripsikan apa itu deradikalisasi dan bagaimana deradikalisasi itu diaplikasikan dalam kontra-

¹⁵ Lindsay Clutterbuck. “Understanding Deradicalization: Pathways to Enhance Transatlantic Common Perceptions and Practices”. The Middle East Institute. Middle East Institute. 10 Juni 2015. Diakses pada 10 Juni 2017. <http://www.mei.edu/sites/default/files/Clutterbuck.pdf>.

terorisme. Jurnal ini juga menjabarkan mengenai perbedaan dari deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan anti-radikalisasi, hal tersebut relevan bagi penelitian ini untuk memahami pada situasi apa deradikalisasi ini tepat untuk dilakukan.

1.9 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivisme sebagai landasan analisa pengaruh Islam dalam keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme. Islam menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya keputusan Arab Saudi. Islam mengkonstruksi identitas Arab Saudi dan juga memiliki pengaruh terhadap budaya serta norma-norma yang berlaku disana. Islam adalah identitas dan budaya bagi Arab Saudi, maka dari itu yang dianalisa dalam skripsi ini adalah identitas dan budaya. Menurut Katzenstein, identitas merupakan sebuah label inti dari beragam konstruksi yang ada di sebuah negara, dimana proses konstruksi tersebut biasanya secara eksplisit bersifat politis dan melibatkan aktor-aktor yang saling berlawanan dengan satu sama lain¹⁶. Konsep identitas digambarkan melalui kekhasan ideologi nasional dan tujuan kolektif¹⁷. Budaya merupakan sebuah label luas yang menunjukkan model kolektif otoritas negara atau identitas, yang dibawa oleh adat atau hukum, budaya juga mengacu pada norma, nilai, dan aturan¹⁸. Definisi budaya dan identitas yang dikemukakan oleh Peter J. Katzenstein tersebut akan dijadikan acuan di dalam skripsi ini untuk menjelaskan identitas dan budaya Arab Saudi yang dikonstruksikan oleh Islam. Selain identitas dan budaya, dalam penelitian ini

¹⁶ Peter J. Katzenstein. *The culture of national security: norms and identity in world politics*. Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she, 2009.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

penulis juga akan menganalisa bagaimana interaksi antara aktor yang terlibat, yaitu Arab Saudi dan kelompok terorisme yang pernah melakukan aksi terorismenya di Arab Saudi. Dalam hubungan internasional ini, interaksi yang terjadi bukan hanya sebatas antar negara dan negara saja, namun aktor non – negara pun terlibat. Penulis memandang bahwa untuk mendukung penelitian ini, interaksi diantara kedua aktor juga perlu dipahami. Karena interaksi yang terjadi, mempengaruhi pandangan suatu aktor mengenai aktor lainnya dan pandangan atau perspektif tersebut akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambil oleh suatu aktor terhadap aktor (tertentu).

Konstruktivisme menjadi pendekatan teoritis yang cukup menonjol sejak kemunculannya pada tahun 1980. Teori ini merupakan kombinasi dari pendekatan sosiologis dan *critical theory*, konstruktivis berpendapat bahwa dunia itu terkonstruksi secara sosial melalui hasil interaksi intersubjektif; dimana agen dan strukturnya saling berhubungan dan memberikan dampak pada satu sama lain; dan faktor – faktor seperti norma, identitas, dan ide secara umum merupakan hal – hal pokok dalam konstitusi dan dinamika politik dunia¹⁹. Menurut teori konstruktivis, segala hal yang terjadi di dunia tidaklah terjadi dengan sendirinya, dunia sosial bukan sesuatu yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis, melainkan sebuah konstruksi sosial dari pemikiran dan gagasan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan memaknainya.²⁰ Segala hal yang ada dalam dinamika suatu negara,

¹⁹ Matt McDonnald. "Constructivism." Edited by Paul Williams. *Security Studies: An Introduction*, (London: Routledge, 2008), Hal 60.

²⁰ Jackson, Robert H., and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches. 5th ed.*, (Oxford: Oxford University Press, 2013). Hal. 211.

termasuk dinamika antarnegara, menurut teori konstruktivis pada hakekatnya dikonstruksikan oleh masyarakat negara tersebut.

Identitas dan interaksi sosial merupakan aspek penting bagi konstruktivis, menurut Alexander Wendt interaksi yang terjadi di politik dunia, konsepsi *self-help* dan *power politics* bukan lah akibat dari anarki. “*Anarchy is what state make of it*”, anarki terbentuk akibat dari interaksi antar negara di ranah politik dunia dan konsep *self-help* bukan lah fitur utama atau terjadi karena anarki, tetapi *self-help* dan *power politics* merupakan bagian dalam proses yang membentuk anarki²¹. Menurut pandangan konstruktivis, anarki dikonstruksi secara sosial oleh negara berdasarkan identitas negara tersebut, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka menciptakan *security dilemma*. Konsepsi ‘*who we are*’ dan ‘*what we value*’ menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya pemikiran – pemikiran tertentu mengenai dimana ancaman terhadap nilai – nilai yang dianut itu berasal, bentuk ancaman tersebut seperti apa, dan apa langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul²².

Menurut Wendt:

Konstruktivisme adalah teori struktural dari sistem internasional yang membuat klaim: (1) negara adalah unit inti dari analisa untuk teori politik internasional; (2) struktur kunci dari system negara adalah intersubjektif bukan material; dan

²¹ Alexander Wendt. *Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics*. 2000. PDF.

²² Matt McDonnald. "Constructivism." Edited by Paul Williams. *Security Studies: An Introduction*, (London: Routledge, 2008), Hal 60.

(3) *identitas dan kepentingan negara adalah bagian penting yang dikonstruksi oleh struktur sosial, bukan berasal dari system yang sudah ada*²³.

Pandangan Wendt mengenai anarki dapat juga digunakan untuk menjelaskan mengenai terorisme. Konstruktivis memandang terorisme dengan ‘kekuatan yang setara’, konstruktivis menganalisa tingkatan yang berbeda dari tiap kepentingan dan identitas aktor non – negara (teroris) untuk memahami interaksi yang terjadi diantara kedua aktor (negara dan teroris)²⁴. Maka dari itu, dilihat dari pandangan konstruktivis, definisi mengenai terorisme dan bagaimana reaksi negara menghadapi terorisme bisa berbeda antara satu dan negara lainnya, hal tersebut tergantung dari bagaimana interaksi kedua aktor. Terorisme terkonstruksi secara sosial, begitu juga dengan kontra-terorisme²⁵. Instrumen kontra-terorisme yang dipilih oleh negara tergantung dari bagaimana negara melihat dan mendefinisikan terorisme, dan juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada di negara tersebut. Selain itu, Konstruktivis menekankan pada pentingnya support dari publik atau masyarakat pada pandangan elit politik dan peran aktor non – negara menjadi penting dalam ‘mengarahkan’ atau memberi sugesti terhadap pemerintah mengenai kebijakan apa yang harus diambil, norma apa yang harus diterapkan²⁶.

Landasan pemikiran utama konstruktivis adalah identitas, konstruktivis menjadikan identitas sebagai landasan utama terkonstruksinya ‘keamanan’ suatu

²³ Maysam Behraves. "Constructivism: An Introduction." E-International Relations. Diakses pada 18 November, 2017. http://www.e-ir.info/2011/02/03/constructivism-an-introduction/#_edn35

²⁴ Janani Krishnaswamy. "How Does Terrorism Lend Itself to Constructivist Understanding?" E-International Relations. 18 September, 2012. Di akses pada 25 Februari 2017. <http://www.e-ir.info/2012/09/18/how-does-terrorism-lend-itself-to-constructivist-understanding/>.

²⁵ Loc.cit.

²⁶ Matt McDonnald. "Constructivism." Edited by Paul Williams. Security Studies: An Introduction, (London: Routledge, 2008), Hal 60.

negara. Dalam konstruktivisme sendiri terdapat 2 jenis penjelasan hubungan antara identitas dan keamanan, yaitu *conventional constructivism* dan *critical constructivism*. Dalam *conventional constructivism*, tujuan utama dalam menguraikan hubungan antara identitas dan keamanan adalah untuk menunjukkan bagaimana identitas nasional (termasuk pengalaman historis dan budaya) berperan dalam membentuk kepentingan negara dan bagaimana negara ‘bereaksi’ dan bertindak dalam menghadapi dinamika politik global²⁷. Sedangkan dalam *critical constructivism*, hubungan antara identitas dan keamanan diuraikan untuk menunjukkan bagaimana narasi dari identitas nasional menjadi dominan dalam konteks tertentu, seperti contohnya menentukan batas – batas yang sah atau berlegitimasi dalam tindakan politik yang diambil oleh negara²⁸.

Conventional constructivism berargumen bahwa “lingkungan keamanan dimana negara tertanam, budaya dan institusi menjadi bagian yang penting daripada hanya sebatas material”, bagi konstruktivis konvensional peran dari ide adalah krusial dalam mengkonstruksi kehidupan social, dan fokus dari *conventional constructivism* adalah aspek sosial bukan material²⁹. Skema dari *conventional constructivism* bisa digambarkan seperti ini:

²⁷ Ibid. Hal 62

²⁸ Loc. cit.

²⁹ Young Chul Cho. "Conventional and Critical Constructivist Approaches to National Security: An Analytical Survey." *The Korean Journal of International Studies*, 2009. Hal 79. doi:10.14731/kjis.2009.06.49.3.75.

Gambar 1.1: Skema *conventional constructivism*



Gambar 1.1: Dirumuskan oleh penulis berdasarkan tulisan di dalam *Conventional and Critical Constructivist Approaches to National Security* oleh Cho Young Chul³⁰

Berdasarkan skema diatas, bisa disimpulkan bahwa menurut *conventional constructivism* kepentingan dan kebijakan suatu negara dibentuk oleh budaya atau norma dan identitas kolektif di negara tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan setiap negara memiliki kepentingan dan kebijakan yang berbeda-beda, karena ada hubungan sebab-akibat diantara identitas/budaya negara tersebut dengan keputusan yang dikeluarkan.

Menurut Peter J. Katzenstein, dalam bukunya yaitu *The Culture of National Security*, kerangka analisis *conventional constructivism* bisa di ilustrasikan sebagai berikut:

1. Efek dari norma (I). Elemen budaya ataupun institusional dari sebuah negara [norma] membentuk kepentingan kemandirian nasional atau (secara langsung) kebijakan keamanan dari negara tersebut;
2. Efek dari norma (II). Elemen budaya atau institusional dari lingkungan global dan domestik sebuah negara [norma] membentuk identitas negara;

³⁰ Ibid. Hal 81-82.

3. Efek dari identitas (I). Variasi di dalam identitas negara, atau perubahan identitas negara, mempengaruhi kepentingan keamanan nasional atau kebijakan dari negara;
4. Efek dari identitas (II). Konfigurasi dari identitas negara mempengaruhi struktur normatif antar negara, seperti rezim atau komunitas keamanan;
5. Rekursivitas. Kebijakan-kebijakan negara, memproduksi dan merekonstruksi struktur budaya dan institusional³¹.

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang bisa dibilang unik, identitas Arab Saudi yang identik dengan islam membuat Arab Saudi menjadi sorotan dalam isu terorisme, disatu sisi Arab Saudi merupakan negara sumber dari kelompok teroris namun disisi lain Arab Saudi juga merupakan negara yang sedang gencar melakukan program kontra-terorisme demi mencegah perkembangan terorisme di negaranya. Persepsi Arab Saudi mengenai terorisme sering menjadi perdebatan di kalangan akademisi, hal ini disebabkan oleh paham Wahhabi yang digunakan Arab Saudi sebagai dasar legitimasi negaranya sering dianggap sebagai akar dari terbentuknya terorisme. Wahhabisme pertama kali ditemukan oleh Muhammad bin Abd Al Wahhab (1703 – 1791), pada intinya paham Wahhabi ini mendorong umat Islam untuk kembali ke praktik agama Islam yang murni dan ortodoks, sebagaimana yang terkandung di Al – Qur'an³².

³¹ Young Chul Cho. "Conventional and Critical Constructivist Approaches to National Security: An Analytical Survey." *The Korean Journal of International Studies*, 2009. Hal 81. doi:10.14731/kjis.2009.06.49.3.75.

³² U.S. Congress. *The Islamic traditions of Wahhabism and Salafiyya*. By Christopher M Blanchard. Cong. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2008. Diakses pada 28 September 2017. <https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf>.

Argumen mengenai paham Wahhabi sebagai akar dari pemikiran radikal dibantah oleh ulama – ulama Arab Saudi, pada tahun 2003 *Higher Council of Ulama* Arab Saudi menyatakan bahwa tindak kekerasan pada masyarakat (yang tidak bersalah) adalah tindak kriminal bukan aksi jihad³³, pemerintah Arab Saudi pun mengecam keras ulama yang membenarkan pemikiran bahwa aksi kekerasan adalah bentuk dari jihad. Arab Saudi sendiri mengecam keras tindakan terorisme dan paham – paham radikal yang tersebar di negaranya, terutama setelah peristiwa *Riyadh Compound Bombings* pada tahun 2003. Pasca kejadian tersebut Arab Saudi mencabut 353 tokoh agama dari posisinya dan melakukan pelatihan kepada 1,357 tokoh agama untuk meminimalisir penyebaran paham – paham radikal yang melenceng dari kepercayaan pemerintah Arab Saudi³⁴.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memadukan pemikiran – pemikiran konstruktivis seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya dan menggunakan *conventional constructivism* yang sudah dijabarkan diatas sebagai kerangka pemikiran serta landasan peneliti dalam menganalisa pengaruh karakteristik dalam keputusan Arab Saudi memilih program deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorisme. Penulis menggunakan *conventional constructivism* sebagai landasan dalam penelitian ini karena *conventional constructivism* dapat menunjukkan atau menguraikan bagaimana identitas dapat berperan dalam membentuk kepentingan negara dan menentukan reaksi negara terhadap suatu dinamika politik global. *Conventional constructivists* mengeksplanasikan bagaimana aktor memperoleh

³³ F. Gregory Gause III. "Saudi Arabia and the War on Terrorism." In *A Practical Guide to Winning the War on Terrorism*. Hoover Institution Press, 2004. Hal 98.

³⁴ *Ibid*, hal. 98.

preferensinya melalui dampak dari norma pada identitas mereka³⁵. Sehingga, pemikiran dalam *conventional constructivism* dapat mengeksplanasikan bagaimana karakteristik Arab Saudi yang dibentuk oleh identitas, budaya, serta norma yang ada di Arab Saudi dapat memberikan pengaruh dalam keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi sebagai instrumen kontra-terorismenya.

1.10 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk memudahkan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penulis mencari data – data, fakta, dan informasi. Metode kualitatif merupakan tipe penelitian ilmiah yang tujuannya adalah untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan penelitian menggunakan set atau prosedur yang sistematis, dengan cara mengumpulkan data atau fakta dan akan menghasilkan temuan – temuan yang akan menjawab pertanyaan penelitian³⁶. Data dan informasi yang telah terkumpul akan dijabarkan dan dielaborasi menggunakan jenis penelitian deskriptif – analitikal dimana hasil data, informasi, dan fakta yang telah terkumpul akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peristiwa – peristiwa terorisme di Arab Saudi, dinamika sosial yang terjadi di Arab Saudi, dalam rentang waktu 2001 – 2003 akan di deskripsikan dan di analisa guna menemukan pola hubungan diantara masalah dan teori yang digunakan di dalam

³⁵ Young Chul Cho. "Conventional and Critical Constructivist Approaches to National Security: An Analytical Survey." *The Korean Journal of International Studies*, 2009. Hal 83. doi:10.14731/kjis.2009.06.49.3.75.

³⁶ Mack, Natasha, and Cynthia Woodsong. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: FLI, 2005. PDF.

penelitian, yang akan dijadikan landasan untuk memperkuat argumentasi penulis di dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. Pengumpulan data dengan studi pustaka dapat dilakukan dengan mengambil referensi dari buku, jurnal, laporan – laporan resmi, maupun halaman internet atau media cetak (dan online) yang terpercaya dan relevan bagi penelitian ini.

1.11 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi 5 pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Di dalam pendahuluan, penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah; identifikasi masalah; pembatasan masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; pertanyaan penelitian; kajian literatur; kerangka pemikiran; metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Sub – bab tersebut akan digunakan penulis sebagai landasan dalam penelitian ini.

BAB II – Islam & Perspektif Arab Saudi terhadap Terorisme

Dalam BAB II ini fokus pembahasan adalah identitas Arab Saudi. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam pembatasan masalah, dalam BAB II ini penulis akan menjabarkan tentang 2 hal, yang pertama adalah Islam dalam identitas dan budaya Arab Saudi, termasuk menjelaskan bagaimana Wahhabisme dan Islam menjadi

bagian dari Arab Saudi, budaya, dan norma di Arab Saudi. Lalu yang kedua adalah pandangan Arab Saudi terhadap terorisme yang akan dibagi menjadi 2, yaitu pandangan Arab Saudi terhadap terorisme pada tahun 1990-awal tahun 2003 dan pandangan Arab Saudi terhadap terorisme pasca *Riyadh Compound Bombings* (pertengahan 2003 hingga akhir tahun 2003).

BAB III – Program Deradikalisasi

Pembahasan pada BAB III ini akan difokuskan pada program deradikalisasi. BAB ini akan menjelaskan mengenai sistematika program deradikalisasi sebagai *soft power approach* yang kini banyak diterapkan negara – negara sebagai instrument kontra-terorisme. Penulis akan menjabarkan bagaimana deradikalisasi dijalankan dan aspek – aspek apa saja yang dilibatkan dalam program ini. Selain itu, dalam bab ini penulis juga akan mendeskripsikan deradikalisasi di Arab Saudi.

BAB IV – Analisa

Dalam BAB IV, penulis akan menjelaskan 3 hal, yang pertama adalah penulis akan menjelaskan mengenai program deradikalisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi, yang kedua penulis akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perspektif Arab Saudi terhadap terorisme yang juga mendorong perubahan metode kontra-terorisme yang digunakan, dan yang ketiga penulis akan menjelaskan bagaimana Islam mempengaruhi keputusan Arab Saudi memilih deradikalisasi.

BAB V – Kesimpulan

Pada BAB terakhir ini, data – data yang telah dikumpulkan penulis akan disatukan dengan analisa yang dilakukan. Kesimpulan dalam BAB ini akan ditekankan pada jawaban pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari analisa – analisa dan pengumpulan data yang telah dijabarkan penulis dalam BAB sebelumnya